

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Bandung memiliki visi tahun 2018-2023 yaitu “Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman, Sejahtera, dan Agamis”. Pada bagian ‘Nyaman’ dijelaskan bahwa kualitas infrastruktur Kota Bandung harus ditingkatkan dengan tetap memperhatikan dampak terhadap kualitas lingkungan dan pelaksanaan pembangunan harus berpihak terhadap lingkungan. Visi Kota Bandung menjadi dasar dari berbagai kebijakan yang dibuat. Kebijakan penataan ruang Kota Bandung dibuat dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Tertera dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 bahwa tujuan dari penataan ruang adalah untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan dengan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional dengan : terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan, dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Untuk menindaklanjuti tujuan penataan ruang tersebut, Kota Bandung menetapkan kebijakan pemerintah kota pada periode 2018-2023 serta adanya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031. PERDA itu sendiri berfungsi sebagai pedoman pembangunan di daerah agar pembangunan dapat dilakukan dengan fokus dan terarah. Pemerintah Kota Bandung turut membantu pembangunan infrastruktur dan penataan ruang dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan daya dukung lingkungan, melalui sistem yang lengkap, terpadu, dan berkelanjutan.

Apabila menganalisis kembali kebijakan rencana tata ruang wilayah Kota Bandung yang telah dilaksanakan sejak tahun 2011, masih terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Beberapa permasalahan pelaksanaan kebijakan tersebut diantaranya : permasalahan lingkungan yang diakibatkan oleh urbanisasi (banyaknya pedagang kaki lima, alih fungsi lahan, dan kurangnya Ruang Terbuka Hijau) dan pertumbuhan penduduk yang tinggi (Sukaesih, 2017).

Pertama, permasalahan lingkungan di Kota Bandung terjadi akibat urbanisasi yang meningkat dengan pesat setiap tahunnya. Fenomena urbanisasi menimbulkan permasalahan seperti banyaknya penduduk pendatang dari berbagai daerah sehingga tenaga kerja di Kota Bandung meningkat. Peningkatan tenaga kerja ini menyebabkan banyak masyarakat mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan kemudian banyak masyarakat yang bekerja pada sektor informal seperti pedagang kaki lima (PKL). Pada umumnya keberadaan PKL ini banyak menempati badan-badan jalan dan trotoar, sehingga pejalan kaki tidak memiliki cukup ruang untuk berjalan, sehingga keberadaan PKL ini perlu diimbangi dengan keteraturan dan ketertiban (Grenada & Rahman, 2017).

Kedua, permasalahan lingkungan lainnya yang menjadi isu lingkungan hidup adalah alih fungsi lahan. Pertumbuhan penduduk yang meningkat begitu cepat menyebabkan aktivitas pembangunan diberbagai bidang juga meningkat dengan cepat, hal inilah yang mendorong terjadinya alih fungsi lahan. Akibatnya banyak area resapan air di Kota Bandung beralih fungsi menjadi pemukiman dan juga banyak dilakukan pembangunan di sepanjang sungai sehingga semakin sempit daerah resapan yang ada. Sungai Cikapundung merupakan salah satu sungai terpanjang di Kota Bandung dengan panjang 28 km, tetapi pada saat ini dapat terlihat di sepanjang tepian sungai Cikapundung dipenuhi oleh area perdagangan serta perumahan. Pada ketentuan perundang-undangan terdapat ketentuan bahwa sepanjang sempadan sungai termasuk ke dalam Ruang Terbuka Hijau (RTH) taman yang harus dikembangkan secara bertahap, hal tersebut bertentangan dengan

yang sedang terjadi saat ini. Maka dari itu tugas pemerintah adalah untuk membangun kembali fungsi dari kawasan tersebut menjadi kawasan budidaya yang dilindungi (Prihatin, 2015).

Ketiga, Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandung masih belum memenuhi standar. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandung, Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bandung masih jauh dari kata ideal. RTH di Kota Bandung pada tahun 2019 hanya mencapai 2.043,52 hektare atau sekitar 12,22 persen, lalu pada tahun 2020 RTH Kota Bandung mencapai 2.048,97 hektare atau sekitar 12,25 persen dari luas wilayah. Menurut Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyatakan bahwa proporsi RTH di kota paling sedikit 30 persen dari luas wilayahnya. Perencanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana membuat tata ruang menjadi tidak beraturan, serta tidak ada zona-zona khusus untuk penempatan berbagai macam bangunan sehingga berakibat pada RTH Kota Bandung menjadi sangat kurang.

Keempat, daya tampung Kota Bandung terhadap jumlah penduduk yaitu sebesar 3 juta. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandung Tahun 2022, jumlah penduduk Kota Bandung berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2021 memiliki 2.527.854 jiwa. Melihat data tersebut, jumlah penduduk Kota Bandung hampir mencapai batas maksimum dari daya tampung kota. Sedangkan lahan di Kota Bandung tidak akan bisa bertambah, oleh sebab itu pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjalankan penataan ruang dengan optimal serta menjadikan kebijakan penataan ruang ini sebagai acuan dalam melakukan pembangunan di Kota Bandung.

Penataan tata ruang arsitektur akhirnya menjadi salah satu awal mula dari perubahan-perubahan yang terjadi serta menjadi tempat untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada. Untuk mewujudkan fungsi ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan perlu dilakukan peninjauan lebih dalam serta melakukan pembaruan rencana tata ruang terhadap kebijakan pemimpin Kota Bandung yang sudah ada. Kota Bandung juga perlu

menyesuaikan peraturan tata ruang dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang baru, dan memperhatikan kebijakan terkait tata ruang yang berlaku, sehingga perencanaan tata ruang di Kota Bandung dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan permasalahan yang ada di kota Bandung tetapi tidak bertentangan dengan peraturan yang sudah ada. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran visi dan kebijakan pemimpin kota dalam penataan arsitektur Kota Bandung dengan mencari indikator kualitas penataan kota yang baik dari elaborasi beberapa teori lalu mencari indikator tersebut dalam dokumen rencana tata ruang kota tahun 2023.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari uraian yang dikemukakan pada latar belakang tersebut, maka dapat diidentifikasi masalah masalah sebagai berikut :

1. Visi Kota Bandung tahun 2018-2023 belum sepenuhnya tercapai karena masih banyak permasalahan yang belum ditangani di Kota Bandung.
2. Urbanisasi menyebabkan peningkatan tenaga kerja sehingga banyak masyarakat yang bekerja sebagai pedagang kaki lima.
3. Pertumbuhan penduduk akibat urbanisasi menyebabkan aktivitas pembangunan meningkat dengan cepat yang mendorong terjadinya alih fungsi lahan.
4. Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandung masih belum memenuhi standar.
5. Peningkatan jumlah penduduk di Kota Bandung sangat pesat.
6. Kurang tegasnya kebijakan pemimpin kota sehingga banyak terjadi permasalahan terkait penataan arsitektur di kota Bandung.

1.3 Batasan Masalah

Pada penelitian ini akan menggunakan pembatasan suatu masalah agar tidak adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah serta lebih terarah. Beberapa batasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Analisis isi deskriptif penataan arsitektur Kota Bandung berdasarkan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2022-2042, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) tahun 2015-2035, Rencana Strategis tahun 2018-2023 (Dinas Pekerjaan Umum), Rencana Strategis tahun 2018-2023 (Dinas Lingkungan Hidup dan Kesehatan), dan Rencana Strategis tahun 2018-2023 (Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Pertamanan) Kota Bandung.
2. Analisis isi deskriptif terkait penataan arsitektur Kota Bandung berdasarkan elaborasi dari teori *good city form*, teori elemen perancangan kota, dan teori *new urbanism* yang menghasilkan tiga indikator yaitu *land function*, *accessibility*, dan *open space*.

1.4 Rumusan Masalah

Bagaimana gambaran visi dan kebijakan pemimpin kota dalam penataan arsitektur Kota Bandung berdasarkan dokumen rencana tata ruang kota tahun 2023?

1.5 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana gambaran visi dan kebijakan pemimpin kota dalam penataan arsitektur Kota Bandung berdasarkan dokumen rencana tata ruang kota tahun 2023.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil dari pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik bagi pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.6.1 Manfaat Teoritis

Dapat memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan pada bidang arsitektur terkait visi dan kebijakan pemimpin kota dalam penataan arsitektur di Kota Bandung. Selain itu, diharapkan melalui penelitian ini dapat menjadi

rujukan dalam penelitian kebijakan penataan arsitektur Kota Bandung selanjutnya.

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Kota

Hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan tindakan bagi pembuat dan pelaksana kebijakan agar kebijakan dalam penataan arsitektur kota yang dihasilkan selanjutnya dapat berdampak lebih baik bagi keberlanjutan Kota Bandung maupun bagi kepentingan publik.

b. Bagi Dunia Pendidikan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan bagi pembelajaran terkait dengan penataan kota khususnya pada mata kuliah Studio Perancangan Arsitektur 4. Penelitian ini juga akan menghasilkan *output* berupa Rencana Perkuliahan Semester untuk satu pertemuan yang dapat diterapkan pada mata kuliah Studio Perancangan Arsitektur 4.

c. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan akan menambah wawasan serta pengetahuan penulis mengenai visi dan kebijakan pemimpin kota dalam penataan arsitektur di Kota Bandung.

1.7 Struktur Organisasi Skripsi

BAB I : Pendahuluan

Bab I berisikan latar belakang penelitian, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, dan struktur organisasi skripsi.

BAB II : Kajian Pustaka

Bab II menjelaskan tentang dasar teori terkait topik-topik yang ada pada penelitian sebagai penguat dari referensi dan teori yang dipakai.

BAB III : Metode Penelitian

Bab III berisikan Langkah-langkah dalam melakukan penelitian seperti desain penelitian, tempat penelitian, pengumpulan data, instrument penelitian, teknik analisis data, dan kisi-kisi instrumen.

BAB IV : Temuan dan Pembahasan

Bab IV berisikan hasil penelitian dan hasil analisis data, juga memuat pembahasan terkait temuan yang dihasilkan.

BAB V : Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi

Bab V berisikan simpulan dari hasil analisis yang ditemukan, implikasi pada penelitian serta rekomendasi terkait penelitian